

## Kebertahanan Petahanan dalam Menjaga Pencalonan Pilkada Kabupaten Probolinggo

Alfan Huda<sup>1\*</sup>, Ali Maksum<sup>2</sup>, George Towar Ikbal Tawakkal<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Magister Sosial, Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

**Abstract.** The election of the incumbent regent cannot be separated from the contributions of political parties and civil society. However, as the regent election progresses, it often experiences degradation in practice. The research aims to reveal how incumbents are able to survive by utilizing political parties and civil society. For this reason, this paper relies on qualitative data collected through structured interviews and informants selected using purposive sampling. This study found that during the regent election, there were practices of weakening and intimidating civil society and political party opportunism. Another important argument is that the incumbent regent becomes dominant and semi-authoritarian in exercising power. The incumbent regent was elected not through a positive image but rather through a negative image that had been built so that the people were submissive and obedient. Apart from that, they also weaken and intimidate civil society. This has implications for the democratic climate in Probolinggo Regency. Confirms the differences, as well as expanding the views of previous research. In maintaining power, it is not enough for the incumbent regent to control many political parties, and he does not have to build a positive image in society to be re-elected.

**Keywords:** Incumbents; Civil Society; Political Parties.

**Abstrak.** Terpilihnya bupati petahana tidak terlepas dari kontribusi partai politik dan masyarakat sipil. Namun demikian, dalam berjalannya pemilihan bupati kerap kali mengalami degradasi dalam praktiknya. Penelitian bertujuan mengungkap bagaimana petahana mampu bertahan dengan memanfaatkan partai politik dan masyarakat sipil. Untuk itu, tulisan ini bersandar pada data kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan Informan dipilih secara *purposive sampling*. Studi ini menemukan, dalam berjalannya pemilihan bupati terjadi praktik pelemahan dan intimidasi pada masyarakat sipil, dan oportunisme partai politik. Argumen penting lainnya, bupati petahana menjadi dominan dan semi otoriter dalam menjalankan kekuasaan. Terpilihnya bupati petahana bukan melalui citra yang positif, melainkan citra negatif yang telah terbangun, sehingga masyarakat tunduk dan patuh. Selain itu, mereka juga melemahkan dan mengintimidasi masyarakat sipil. Hal ini berimplikasi terhadap berjalannya kontestasi di Kabupaten Probolinggo. Menegaskan perbedaan, sekaligus menjadi perluasan pandangan dari penelitian sebelumnya. Bahwa dalam mempertahankan kekuasaan, bupati petahana tidak cukup hanya menguasai banyak partai politik, serta tidak harus membangun citra yang positif pada masyarakat untuk terpilih kembali.

**Keywords:** Petahana; Masyarakat sipil; Partai politik.

Received: 05/07/2024

Revised: 29/09/2024

Accepted: 29/09/2024

### Korespondensi:

Pascasarjana FISIP Universitas Brawijaya  
Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65145  
Email: alfanhudao85@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pemilihan Bupati telah menjadi arena pertarungan perebutan kekuasaan di tingkat lokal (Arafat, Sahrin, and Hadi 2022). Selain sebagai arena proses regenerasi kepemimpinan. Pemilihan Bupati merupakan ajang evaluasi para pejabat bagi masyarakat (Zuhro 2021). Namun demikian, dalam berjalannya proses pemilihan bupati, muncul dominasi petahana dalam Pemilihan kepala daerah. Tercatat dari 171 daerah pemilihan, setidaknya terdapat 64 kepala daerah petahana yang menang dan akan memimpin kembali. Bahkan, tahun 2020 pada pemilihan kepala daerah yang berlangsung di 270 daerah, ada 25 persen petahana dari total 1.324 bakal calon kepaladaerah dan wakil kepala daerah. Persentase ini tertinggi dari tiga gelombang pemilihan bupati sebelumnya. Terjadinya masalah ini tidak terlepas dari buruknya pelembagaan partai politik. Serta ketidakberdayaan masyarakat sipil dalam Pemilihan Bupati. Menunjukkan, pasca reformasi kualitas pemilihan kepala daerah di Indonesia cenderung mengalami stagnasi (Marwiyah et al. 2022). Kehadiran masyarakat kerap kali dipolitisasi, diperdaya, dan diberi pengharapan palsu oleh aktor politik. Sehingga sistem pemilihan kepala daerah yang cenderung tidak transparan membuat masyarakat hanya menjadi objek politik (Kartiwan 2022).

Sejauh ini studi tentang keberhasilan petahana cenderung melihat tiga isu utama. Pertama, figur politik petahana (Kartika 2021). Kedua, komunikasi politik petahana (Alhidayah 2020; Jone 2022). Ketiga, kinerja petahana (Perangin-Angin and Raffiudin 2023). Studi yang dilakukan menjelaskan bahwa keterpilihan petahana tidak terlepas dari figur, kinerja, dan komunikasi politik yang dilakukan (Jone 2022; Perangin-Angin and Raffiudin 2023; Sobari 2022, 2023a). Lebih lanjut, Habodin dan Afala memperluas bahwa terpilihnya petahana karena faktor kebijakan populis, terobosan, dan inovasi (Haboddin and Afala 2020). Bland D. Lewis dkk. Menegaskan, keterpilihan petahana bergantung pada kemajuan dalam penyediaan layanan di daerah (Lewis, Nguyen, and Hendrawan 2020). Kajian lain mengungkap, bahwa keterpilihan petahana tidak bisa lepas dari banyaknya dukungan partai politik (Mukaromah 2022). Meski demikian, dukungan dari banyaknya partai politik tidak bisa

menjadi jaminan bahwa petahana bisa terpilih kembali (Sobari 2022). Dari beberapa kecenderungan penelitian, kajian ini hendak memperluas. Mengisi celah kekosongan bahwa, terpilihnya petahana juga bisa berasal dari citra negatif dan menebar ketakutan, sehingga masyarakat tunduk dan patuh. Cara ini berhasil dilakukan Bupati Petahana Probolinggo dalam mempertahankan kekuasaan Selama 18 tahun.

Penelitian ini menjadi penting untuk melengkapi keterbatasan dari studi yang ada, yang luput melihat bagaimana cara Bupati Petahana bertahan melalui cara negatif. Hal ini tentu mengkhawatirkan, mengingat keluarga petahana telah berkuasa dalam kurun waktu yang lama. Dari waktu ke waktu, dalam berjalannya pemilihan kepala daerah kekuasaan hanya berputar di lingkaran keluarga petahana. Studi ini memungkinkan diperoleh suatu pengetahuan yang mendalam. Tentang cara petahana bertahan demi kelangsungan hidup politik mereka. Hal ini membuat Partai politik dan masyarakat sipil kehilangan taji dan tunduk pada penguasa. Sementara masyarakat sipil, mengalami ketidakberdayaan sebagai kontrol bagi pemerintah yang berkuasa. Padahal, masyarakat sipil dan partai politik memegang peranan vital dalam proses pembangunan demokrasi lokal (Martin, de Lange, and van der Brug 2022). Kondisi ini tidak terlepas dari menjauhnya partai politik dengan masyarakat, kedudukan masyarakat sipil yang lemah, serta kekuasaan yang dominan pada petahana. Dengan memanfaatkan jaringan dukungan partai koalisi, petahana mampu mendesain kondisi politik yang menguntungkan mereka. Sementara masyarakat sipil dihadapkan akan ancaman, intervensi, ketakutan, konflik, dan upaya pelemahan lainnya, ketika berbeda pandangan dengan penguasa.

Terpilihnya Bupati Petahana Kabupaten Probolinggo tidak terlepas dari relasi yang terbangun dengan partai politik dan masyarakat sipil. Keterpautan yang digerakkan oleh petahana, dalam rangka mempertahankan kekuasaan mereka. Relasi yang dibangun merupakan bentuk pelemahan yang mengharuskan partai politik dan masyarakat sipil harus tunduk terhadapnya. Hal ini dilakukan petahana sebagai bentuk penekanan pengaruh oleh seorang kepala daerah atau pimpinan politik di Kabupaten Probolinggo. Hal ini terlihat dari realitas politik yang menunjukkan

bahwasanya partai politik sudah tak lagi berjuang atas kepentingan rakyat. Bergabungnya Partai Golkar, PDI-P, Gerindra, dan PPP tak lebih hanya sekedar koalisi turah. Yaitu serba boleh tanpa harus memperhatikan nilai-nilai yang akan diperjuangkan. Dengan demikian, Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab persoalan yang terjadi. Mengapa petahana masih terpilih kembali, dan begitu dominan meski citra mereka sudah negatif dihadapan masyarakat. Hal ini tentu mengkhawatirkan, berkuasanya keluarga petahana dalam kurun waktu yang lama perlu kita curigai. Dari waktu ke waktu, dalam berjalannya pemilihan kepala daerah kekuasaan hanya berputar di lingkaran keluarga petahanan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan desain penelitian studi kasus. Dipilih untuk memahami subjek penelitian. Seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Alasan dipilihnya Probolinggo karena terjadi krisis kepemimpinan. Menunjukkan adanya kegagalan partai politik dalam membangun kaderisasi. Selain itu, daerah ini mempunyai karakter partisipasi politik yang berbeda dengan daerah lain. Sebagai daerah yang memiliki corak ke-Islaman yang sangat kental, Peran ulama/kyai sangat signifikan dalam membentuk preferensi politik masyarakat. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara yang dilakukan dengan narasumber. Proses pengumpulan data primer dilakukan secara langsung melalui wawancara. Sementara data sekunder yang digunakan berasal dari jurnal, buku, arsip, berita dan dokumen sebagai pendukung untuk melengkapi data sebelumnya.

Penentuan informan menggunakan teknik *Purposive sampling*. Sebelum menentukan narasumber, peneliti membuat kriteria terlebih dahulu. Hal ini dipilih untuk menemukan informan kunci, yang memiliki banyak informasi yang dapat memberikan jawaban terkait masalah penelitian. Berikut daftar para narasumber.

**Tabel. 1**  
**Daftar Informan**

| No | Nama | Jabatan | Instansi |
|----|------|---------|----------|
|----|------|---------|----------|

|     |                          |                     |                     |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.  | Isnani<br>(Samaran)      | Pengurus            | Partai Nasdem       |
| 2.  | M. Husnaini<br>(Samaran) | Pengurus            | Partai<br>Gerindra  |
| 3.  | Bunadi<br>(Samaran)      | Pengurus            | Partai PDI-P        |
| 4.  | Sutarjo<br>(Samaran)     | Pengurus            | Partai PPP          |
| 5.  | Salimah<br>(Samaran)     | Pengurus            | Partai Golkar       |
| 6.  | Indra<br>(Samaran)       | Aktivis LSM         | Detik<br>Nusantara  |
| 7.  | Johan<br>(Samaran)       | Pengurus            | LSM Permasa         |
| 8.  | Baihaqi<br>(Samaran)     | Tokoh<br>Pergerakan | Masyarakat<br>Sipil |
| 9.  | Burhan<br>(Samaran)      | Pengurus            | Nahdlatul<br>Ulama  |
| 10. | Dodik<br>(Samaran)       | Pengurus            | Muhammadiyah        |

Sumber : Diolah oleh peneliti

Alasan dipilihnya pengurus partai politik karena mereka merupakan orang yang paling bertanggung jawab secara struktural. Dalam proses pengambilan keputusan berjalannya roda organisasi, dan keterlibatan mereka dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Sedangkan aktivis, LSM dan Ormas mereka memiliki pengalaman dan terlibat secara langsung selama Bupati Petahana berkuasa dan memiliki pengetahuan dalam menjelaskan suatu fenomena politik yang terjadi. Hal ini membantu peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan tepat (Sobari 2023b).

Kemudian, teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif terdiri atas: (1) Pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) Penyajian data dan (4) penarikan kesimpulan. Berikut penjelasan terkait model interaktif (Matthew B. Miles; A. Michael Huberman 2014). Sementara, untuk menguji keakuratan data yang telah diperoleh dilapangan, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Hal ini dipilih untuk mengurangi bias yang terjadi selama pengumpulan dan analisis data. teknik ini dapat mempertajam daya sehingga data dapat dipercaya. Dengan membandingkan hasil wawancara dari setiap sumber atau informan memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar. Dengan kata lain, adalah proses memeriksa data melalui perbandingan fakta dari berbagai sumber.

Selama proses pencarian data, peneliti banyak mengalami kesulitan dikarenakan banyak narasumber yang takut dan menolak untuk memberikan keterangan, hingga beberapa kali berganti namun tidak mengurangi substansi penelitian. Selain itu, terdapat narasumber yang tertutup dan tidak transparan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah informan dan durasi penelitian yang kurang lama. Sehingga seharusnya masih terdapat data-data yang belum ter gali dengan sempurna.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Praktik Pelemahan Masyarakat Sipil dan Oportunisme Partai Politik dalam Berjalannya Pemilihan Bupati

Masyarakat sipil dan partai politik tidak bisa terlepas dari berjalannya Pemilihan Bupati di Kabupaten Probolinggo. Sebagai kekuatan yang mengartikulasi aspirasi masyarakat, punya kekuatan tawar atau *bargaining position* dengan pemerintah. Namun faktanya, keberadaan masyarakat sipil dan partai politik di Kabupaten Probolinggo semakin melemah, dan menjadi bagian dari pemerintah yang berkuasa. Hal ini terlihat dimana terjadi praktik-praktik pelemahan terhadap masyarakat sipil. Selama petahana berkuasa, peran masyarakat sipil kerap kali dilemahkan dengan ancaman intimidasi, pemanggilan, serta pengkondisian untuk memihak mereka. Melemahnya kemampuan masyarakat sipil untuk melawan kemunduran demokrasi yang didorong oleh pemerintah yang berkuasa telah memperparah kemerosotan demokrasi di Kabupaten Probolinggo, baik secara prosedur maupun secara substansi. Hal ini diungkapkan salah satu aktivis LSM yang merupakan narasumber peneliti;

“Saya kira bukan jadi rahasia umum, semua orang tau akan hal itu mas. Bagaimana ketika N1 ini berkuasa, bahasanya teman-teman LSM ataupun media ini dikondisikan. Tetapi beliau melakukan hal hal semacam itu bukan secara langsung melainkan menggunakan orang-orangnya. Jadi mas bisa lihat sendiri itu berita berita yang muncul di probolinggo, palingan ya cuman berita yang bagus-bagus saja. Untuk terkait kepedulian, sebenarnya masyarakat sudah peduli dan melek politik cuman yaitu, mungkin karena takut jadi mending mereka diam. Daripada mereka kenapa- kenapa kan.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara peneliti.

Sulit untuk mengatakan bahwa masyarakat sipil akan mampu mendominasi ruang demokrasi di Kabupaten Probolinggo jika melihat realita saat ini. Hal ini bukan bermaksud memiliki sikap pesimistis yang lahir begitu saja, tetapi merupakan suatu pembacaan atas realitas politik dan ekonomi di Kabupaten Probolinggo yang sedikit banyak justru mengalienasi masyarakat sipil. Posisi masyarakat sipil tidak memberikan dampak signifikan bagi konsolidasi demokrasi selama pemerintahan Tantriana Sari. Justru yang tampak dalam berbagi hasil dilapangan, gambaran suatu masyarakat sipil yang jauh lebih lemah dan tidak mampu menyokong agenda-agenda demokratis di Kabupaten Probolinggo. Operasionalisasi jaringan petahana dalam melemahkan posisi masyarakat sipil termanifestasi dalam tindakan represif hingga melalui sejumlah intimidasi serta pembatasan ekspresi kebebasan di ruang publik yang selama menjabat sering kali digunakan sebagai instrumen dalam membungkam kritik terhadapnya. Di tengah melemahnya dan tersubordinasinya posisi masyarakat sipil, semakin menegaskan dominasi kekuasaan pada pemerintah yang berkuasa.

“Sekarang dilogika saja kondisi masyarakat sipil kita seperti ini, dan yang kita hadapi ya *samean* tau sendiri. Saya kira teman-teman lebih baik cari aman daripada kenapa-napa mas. Sebenarnya orang-orangnya bapak ini, apalagi ketika mendekati momen-momen pemilihan.”<sup>2</sup>

Posisi masyarakat sipil di bawah rezim Hasan-Tantri memang sangat dilematis. Dalam situasi seperti itu membuat gerakan progresif masyarakat sipil tidak mengakar dan tumbuh kuat. Penundukan dan resistansi ini kerap tidak sebanding dan malah menyingkirkan. Penundukan oleh kalangan elite dominan di satu sisi terhadap masyarakat sipil. Misalnya, hal ini ditandai dengan tidak adanya agenda perlawanan yang masif. Sebaliknya, di sisi yang lain, posisi masyarakat sipil dalam ruang demokrasi, tidak pernah benar-benar solid. Alhasil, optimisme masyarakat sipil terhadap jalannya demokrasi di Kabupaten Probolinggo tidak pernah mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat sipil. Justru sebaliknya, mereka memfasilitasi kepentingan elite dominan menggeser kepentingan rakyat dari arena politik. Hal ini juga bisa menciptakan iklim ketakutan dan kecemasan di antara

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara penulis.

masyarakat Kabupaten Probolinggo, dimana partisipasi mereka digerakkan atas keterpaksaan.

*“Beliau ini orang kuat mas, masyarakat tidak berani berbuat apa apa. Saya juga ada pengalaman dulu kakaknya saya pernah ketahuan tidak mendukung beliau, langsung diberhentikan dari pabrik, saya juga tidak paham kobisa tau itu gimana caranya, saya juga heran, mangkanya masyarakat ga berani neko-neko, bisa ketahuan itulah. Sekarang kan cari kerja juga susah mas. Jadi itu memang benar, selain dipindah bisa juga diberhentikan.”<sup>3</sup>*

Permusuhan yang ditunjukkan oleh keluarga Hasan-Tantri terhadap organisasi masyarakat sipil menunjukkan watak pemerintah dalam berkuasa. Masyarakat sipil dipandang sebagai kelompok pengganggu yang tindakannya dapat mengancam reputasi pemerintah yang dapat mengikis kekuasaan mereka secara perlahan. Kediktatoran yang intimidatif ini tentu akan menghancurkan masyarakat sipil. Padahal kehadiran masyarakat sipil saling melengkapi, bukan menjadi saingan pemerintah terhadap berjalannya demokrasi di tingkat lokal. Kondisi ini menyebabkan masyarakat sipil mengalami stagnasi, bahkan memilih diam meskipun terjadi praktik penyimpangan.

*“Beliau ini orang kuat mas, masyarakat tidak berani berbuat apa apa. Saya juga ada pengalaman dulu kakaknya saya pernah ketahuan tidak mendukung beliau, langsung diberhentikan dari pabrik, saya juga tidak paham kobisa tau itu gimana caranya, saya juga heran, mangkanya masyarakat ga berani neko-neko, bisa ketahuan itulah. Sekarang kan cari kerja juga susah mas. Jadi itu memang benar, selain dipindah bisa juga diberhentikan.”*

Sementara kehadiran partai politik saat Pemilihan Bupati menunjukkan sikap yang oportunistis dan pragmatis. Dimana dalam proses kandidasi dan penentuan calon pengurus pusat masih tetap memegang peran dominan dalam mencampuri urusan-urusan di daerah. Kekuasaan pada partai politik menjadi terpusat dan mendominasi. Fakta ini sangat mengkhawatirkan. Kekuasaan yang sentralistik bisa berdampak buruk pada partai politik yang berpotensi mengalami krisis kepemimpinan dan mandeknya demokrasi di internal partai. Perlu adanya pembagian kekuasaan serta pelibatan anggota dalam pengambilan keputusan khususnya pengurus DPC dalam mengatur wilayah kekuasaannya. Ketidakmandirian ini membuat pengurus partai di daerah kehilangan kedaulatan dalam menentukan keputusan. Membuat mereka menjadi tidak leluasa dalam menjalankan roda organisasi karena peran yang sangat terbatas. Dewan Pengurus Cabang (DPC) sangat bergantung dan patuh pada instruksi pengurus pusat dalam menentukan keputusan. Hal ini menunjukkan

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara penulis.

terjadinya paradoks demokrasi pasca diberlakukannya pembagian kekuasaan pada daerah.

*“Saat kita akan mengambil keputusan kita melakukan rapat konsolidasi namanya rapimcab, rapat pimpinan cabang melibatkan 24 kecamatan itu kita mendengarkan aspirasi mereka untuk cenderung kemana, setelah itu kita mengajukan rekom ke pusat, tidak berarti apa yang sudah kita putuskan dicabang otomatis akan dikabulkan oleh pusat. Kita hanya mengumpulkan aspirasi itu mas, ketika pusat tidak menyetujui ya kami harus menjalankan mandat itu. Teman-teman menerima saja, walaupun ada gejala hal itu biasa dalam politik.”<sup>4</sup>*

Melihat pernyataan tersebut, wajar jika partai politik nyaris tidak menghasilkan kader yang potensial, karena belum dibangun sistem persaingan yang sehat bagi kader partai. Kondisi ini bisa membunuh kader dalam hal loyalitas. Kader-kader partai akan cenderung pragmatis dan berpindah-pindah partai ditengah ketidakpastiaan karir politiknya. Semua keputusan sangat tergantung pada pusat, daerah tinggal melaksanakan, sekalipun bertentangan dengan aspirasi daerah. Praktik semacam ini kerap kali mengganggu kondusifitas internal partai politik dan tak jarang berakhir konflik. Kuatnya dominasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik dalam menentukan calon kepala daerah, tidak jarang aspirasi dari kader ditingkat DPC dan DPD diabaikan sebagai calon, karena dinilai tidak memiliki kualitas finansial dan juga popularitas. Dominasi elit parpol ditingkat pusat terlihat cukup signifikan, sehingga semua calon yang memiliki kursi di DPRD terpaksa mendukung calon pilihan pusat, meskipun mereka juga memiliki keinginan mendukung calon lain sebagai penantang untuk berkompetisi.

*“Kampanye dan proses politik itu ongkosnya mahal. Kita pengurus di daerah juga terbatas anggarannya, paling kita mengandalkan iuran dari kader yang menjabat. Selain itu kami memanfaatkan subsidi dari pusat itu.”<sup>5</sup>*

Kebutuhan dana yang besar pada biaya operasional partai membuat partai politik di daerah sangat bergantung pada sumbangan pengurus pusat (DPP) atau elit politik. Hampir semua partai menggantungkan hidupnya pada dana yang berasal dari pusat. Tidak mengherankan apabila pengaruh elit pusat menjadi sangat dominan dalam menentukan arah gerak partai. Kondisi seperti itu yang menjadi salah satu penyebab pengurus partai di Kabupaten Probolinggo harus patuh pada setiap keputusan DPP. Biaya operasional dan aktivitas kampanye partai politik yang

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara penulis.

<sup>5</sup> Hasil wawancara, pernyataan yang sama juga disampaikan narasumber lain.

meningkat selama pemilu, membuat partai politik di daerah hanya mengandalkan sumbangan dari pusat dan pemodal. Masuknya uang donatur dapat mengubah perilaku partai politik. Keterbatasan ini membuat partai politik perlahan meninggalkan idealismenya. Sehingga terus mendorong pencarian pembiayaan mandiri oleh partai politik, seperti meningkatkan penggalangan dana internal dan eksternal. Termasuk menuntut biaya tetap dari anggota parlemen, menggunakan dana pemerintah alternatif dan menjual surat rekomendasi kepada orang kaya.

### Keterpilihan Kembali Bupati Petahanan

Kemunculan Puput Tantriana Sari sebagai petahana selama dua periode, adalah bukti nyata kesuksesan mereka dalam mempertahankan kekuasaan dari rival politik selama bertahun-tahun. Dominannya Petahana pada Pemilihan Bupati tidak terlepas dari cara mereka membangun relasi kuasa mulai dari tingkat paling bawah. Mereka menempatkan anggota keluarga dan orang-orang kepercayaan mereka pada beberapa jabatan penting. Mereka menempatkan orang-orang yang telah direkomendasikan menjadi Kades maupun PJ Kades. Ketika mereka sudah menguasai di tingkat paling bawah, maka alur pengkondisian dan mobilisasi masa saat Pemilihan Bupati akan lebih mudah ketika pemilihan. Dengan cara seperti itu basis masa pendukung akan tetap terjaga dan para bawahan yang mengisi jabatan di tingkat desa akan loyal kepadanya karena telah diberi ruang untuk mengisi pos-pos kekuasaan yang disediakan. Mereka memanfaatkan kekosongan jabatan ketika para kepala Desa akan purna tugas dengan diisi oleh para ASN yang pengusulan nama-namanya diinisiasi oleh camat dengan persyaratan-persyaratan khusus dimana usulan nama-nama pejabat Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan dari Hasan Aminuddin, persetujuan tersebut diberikan dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari.

“ Semua perangkat di desa ini kita tidak bisa macam-macam mas, saya juga tidak berani memberikan keterangan yang lebih jauh, para pegawai inikan Sknya daribupati, ya mereka harus patuh mas. Sama saja samean meski mau tanya-tanya ke yang lain keterengannya bakal sama, mereka juga pasti takut dan ga berani.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara.



**Gambar 1.** Laman berita terkait Bupati Probolinggo  
*Sumber: Detik.Com*

Selain itu, petahana memiliki niat terselubung untuk membangun dinasti kekuasaannya dengan menggandeng partai politik dan masyarakat sipil. Sehingga, dalam berkoalisi mereka sudah tidak mempertimbangkan persamaan nilai atau ideologi yang akan diperjuangkan ketika bekerjasama. Relasi yang terbangun antara petahana, masyarakat sipil, dan partai politik membuat persaingan menjadi tidak kompetitif. Kekuatan menjadi tidak berimbang dalam berkompetisi. Hal semacam itu pada akhirnya melahirkan sikap partai politik yang sudah tidak lagi membicarakan mengenai hal-hal yang bersifat ideologis. Batas-batas tersebut menjadi kabur dan tidak jelas antar partai satu dengan yang lain. Persekongkolan yang terjadi, sangat erat dengan tumbuhnya oligarki di internal partai. Kepemimpinan partai hanya berada pada elite-elite tertentu, biasanya mereka memiliki kekuasaan ekonomi, dengan kekayaan materi yang dimiliki. Mereka mampu untuk mengendalikan arah politik sesuai kehendaknya. Jabatan publik yang seharusnya untuk kepentingan rakyat dan menjadi lahan pengabdian, kini telah berubah menjadi sarana untuk berbisnis dan mencari penghasilan secara pribadi.

“Banyak sebenarnya orang-orang khususnya masyarakat probolinggo yang tidak suka dia, cumanga berani. Sekarang gini aja, guru-guru atau para pegawai negeri sipil itu, waktu beliau menjabat kalo ketahuan tidak

mencoblos dia maka siap-siap dipindah. Yang rumahnya di gunung tugasnya dipindah ditepi pantai, yang rumahnya dipantai dipindah tugasnya di atas gunung. Jadi kalo aktivis-aktivis ini cara melawannya ya ada sebagian yang bergabung ke calon sebelah.”<sup>7</sup>

Alhasil, semenjak terpilih dan memimpin menjadi Bupati. Kabupaten Probolinggo masih menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang makin kompleks. Seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, pernikahan dini dan masalah sosial lainnya yang makin rumit. Hal ini juga menunjukkan, bagaimana hasil kinerja bupati petahana tidak cukup baik selama ini. Selamat menjabat, mereka dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan intimidatif, kita bisa melihat di berbagai platform pemberitaan hingga kesaksian masyarakat seperti kasus ASN yang banyak menjadi korban mutasi karena tak loyal kepadanya. Selain itu, pembangunan di Kabupaten Probolinggo cenderung mengalami stagnasi baik bersifat fisik maupun non fisik. Selama 18 tahun Kabupaten Probolinggo berada dibawah kuasanya, daerah ini masih belum bisa keluar dari masalah sosial yang terjadi. Lebih parah lagi, Kabupaten Probolinggo menempati rangking empat di Jawa Timur dengan persentase penduduk miskin tertinggi.

Praktik kesewenang-wenangan Bupati Petahana sudah menjadi rahasia umum selama menjabat. Masyarakat dan pegawai pemerintahan Kabupaten Probolinggo seakan terbelenggu dan hidup dalam ketakutan, kritik dibungkam, praktik korupsi, keterlibatan ASN diranah politik, penggunaan kekerasan dan intimidasi ketika perbedaan pilihan politik, tentu hal-hal semacam ini telah menciderai demokrasi di Kabupaten Probolinggo. Dari hal tersebut dapat kita pahami superiornya petahana pada Pemilihan Bupati tidak bisa dilepaskan dari cara-cara mereka dalam menjaga kekuasaannya. Hal ini menunjukkan dalam menjalankan perannya, petahana telah gagal untuk memberikan kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. Dimana mereka tidak mampu mewujudkan visi misi politiknya untuk mewujudkan Kabupaten Probolinggo yang mandiri secara ekonomi serta berkeadilan.

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara penulis.

## Dampak Relasi yang Terbangun antara Petahanan, Masyarakat Sipil, dan Partai Politik

Relasi yang terbangun antara petahana, masyarakat sipil, dan partai politik membuat persaingan menjadi tidak kompetitif. Kekuatan menjadi tidak berimbang dalam berkompetisi. Apalagi yang menjadi lawan adalah petahana yang notabene sudah memiliki modal sosial, ekonomi, politik dan kepopuleran dimasyarakat. Tantriana Sari merupakan istri dari tokoh politisi senior Hasan Aminudin yang sebelumnya juga menjabat Bupati dua periode dan merupakan orang kuat lokal yang berpengaruh. Dapat dikatakan Hasan Aminudin merupakan aktor sentral dalam dunia percaturan politik Kabupaten Probolinggo. Sementara wakil dari Tantriana Sari yaitu Timbul Prihandjoko merupakan ketua DPC PDIP sebelum digantikan oleh Edi yang saat ini sedang menjabat. Sehingga bukan suatu hal yang mengejutkan, selain alasan didukung oleh banyak parpol mereka juga merupakan pasangan petahana yang begitu dominan yang sulit digusur sehingga dalam setiap survei yang dilakukan elektabilitas mereka selalu menempati di urutan teratas.

Tindakan mereka yang secara bersama-sama untuk mendominasi, dan bersepakat untuk tidak bersaing satu sama lain. Alasan dari adanya hal ini untuk meminimalisir adanya resiko. Partai politik dan masyarakat sipil yang berada diluar kelompok mereka mengalami kesulitan untuk bersaing. Petahana memiliki niat terselubung untuk membangun dinasti kekuasaannya dengan menggandeng partai politik dan masyarakat sipil. Sehingga, dalam berkoalisi mereka sudah tidak mempertimbangkan persamaan nilai atau ideologi yang akan diperjuangkan ketika bekerjasama.

Pasangan calon petahana Tantriana Sari-Timbul Prihanjoko (HATI) diusung oleh Partai Nasdem (16 kursi), PDI-Perjuangan (5 kursi), Partai Golkar (7 kursi), Partai Gerindra (7 kursi) dan PPP (7 kursi) mendaftar pertama di Kantor KPU Kabupaten Probolinggo. Kemudian pasangan Abdul Malik Haramain-Muhammad Muzayyan (MMC) yang diusung oleh PKB (8 kursi) dan Partai Demokrat (1 kursi) mendaftar ke Kantor KPU Kabupaten Probolinggo pada hari terakhir pendaftaran. Oleh sebab itu cara-cara seperti ini dapat mereduksi berjalannya demokrasi di tingkat lokal. Keterlibatan partai politik dan masyarakat sipil pada setiap ruang kekuasaan

membuat semua ingin terlibat dalam setiap pembentukan pemerintahan. Aroma persekongkolan sangat terasa dibandingkan proses persaingan.

“Banyak sebenarnya orang-orang khususnya masyarakat probolinggo yang tidak suka dia, cuman ga berani. Sekarang gini aja, guru-guru atau para pegawai negri sipil itu, waktu beliau menjabat kalo ketahuan tidak mencoblos dia maka siap-siap dipindah. Yang rumahnya di gunung tugasnya dipindah ditepi pantai, yang rumahnya dipantai dipindah tugasnya di atas gunung. Jadi kalo aktivis-aktivis ini cara melawannya ya ada sebagian yang bergabung ke calon sebelah.”

Dilema ini muncul ketika partai tersebut membutuhkan mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan. Namun calon mitra dengan ideologi yang serupa tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melawan lawan politiknya. Otomatis partai tersebut akan bergabung yang secara kalkulasi politik tingkat kemenangannya tinggi meskipun berbeda ideologi. Dalam situasi ini jenis arena persaingan diarena politik bisa mengubah perilaku partai untuk mencapai tujuan yang berbeda. Tetap memegang komitmen dan ideliasme tapi tidak mendapatkan jabatan atau sebaliknya. Inilah akhirnya yang membuat partai politik mengesampingkan hal-hal yang bersifat ideologis. Ketika berada di tataran elektoral. Sebab rakyat sebagai pemilih juga lebih melihat hal-hal yang bersifat praktis, termasuk salah satu contoh transaksi jual beli suara.

Alhasil, semenjak terpilih dan memimpin menjadi Bupati. Kabupaten Probolinggo masih menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang makin kompleks. Hal ini juga menunjukkan, bagaimana hasil kinerja bupati petahana selama ini. Selamat menjabat, mereka dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan intimidatif, kita bisa melihat di berbagai platform pemberitaan hingga kesaksian masyarakat seperti kasus ASN yang banyak menjadi korban mutasi karena tak loyal kepadanya. Selain itu, pembangunan daerah di Kabupaten Probolinggo selama mereka menjabat cenderung mengalami stagnasi pembangunan baik bersifat fisik maupun non fisik. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh salah satu narasumber, dimana *track record* mereka cenderung negatif selama memimpin.

## KESIMPULAN

Dalam proses terpilihnya Bupati Petahana Partai politik dan Masyarakat sipil

telah kehilangan bargaining dihadapan penguasa saat Pemilihan Bupati, dimana partai politik sudah tidak lagi membicarakan ideologi yang menjadi landasan mereka dalam berjuang, hal ini terbukti dalam pembentukan koalisi besar. Sementara kondisi masyarakat sipil terjadi ketimpangan kekuasaan untuk menjadi kekuatan penyeimbang dari petahana. Saat Pemilihan Bupati berlangsung, petahana juga kerap melakukan mobilisasi ASN, Politisasi birokrasi, dan Intimidasi, terhadap orang atau kelompok yang mengkritisi mereka. Selama mereka menjabat Kabupaten Probolinggo masih menghadapi berbagai permasalahan sosial yang makin kompleks.

Demokrasi di Kabupaten Probolinggo menjadi tereduksi, karena petahana berusaha untuk meminimalisir terjadinya persaingan, dan menihilkan peran oposisi. Penelitian ini memiliki keterbatasan, dalam penggalian data secara mendalam. Narasumber banyak tidak berkenan karena topik yang dibahas terlalu sensitif. Oleh karena itu kepada peneliti selanjutnya agar melanjutkan penelitian ini lebih komprehensif dengan jumlah narasumber yang lebih banyak, waktu penelitian yang lebih lama, serta penggalian data yang lebih mendalam, sehingga keberlanjutan ini dapat menyempurnakan hasil penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alhidayah, Ahmad Yozi. 2020. "Strategi Komunikasi Politik Rohidin Mersyah Sebagai Calon Petahana Pilkada 2020 Provinsi Bengkulu." *Jurnal Komunikasi Dan Budaya*1(1):18–23.
- Arafat, Yasser, Alfi Sahrin, and Arnasari Merdekawati Hadi. 2022. "Pilkada Antara Pertarungan Gagasan Dan Perebutan Kekuasaan." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 8(2):22–35.
- Haboddin, M., and L. O. M. Afala. 2020. "Incumbent Strategy of Nurdin Abdullah in Maintaining Power in Bantaeng." P. 485 in *B-SPACE 2019: Proceedings of the First Brawijaya International Conference on Social and Political Sciences*,

BSPACE, 26-28 November, 2019, Malang, East Java, Indonesia. European Alliance for Innovation.

I. Publisher. Malang.

Jone, Yoseva Millenia Rahma. 2022. "Strategi Komunikasi Petahana Dalam Mempertahankan Elektabilitas Pada Pilkada Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Di Kecamatan Muara Lawa."

Kartika, Andi Irfani. 2021. "Figur Politik Petahana A. Kaswadi Razak Pada Pemilihan Bupati Soppeng Tahun 2020."

Kartiwan, Ikhwan. 2022. "Kejatuhan Politik Dinasti Di Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Kasus Kekalahan Pasangan Ali Basrah–Denny Febrian Roza Pada Pilkada 2017)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 7(1).

Kepemimpinan Politik Dan Nilai Demokrasi." *Politika* (November). doi: 10.14710/politika.13.2.2022.227-252.

Lewis, Blane D., Hieu T. M. Nguyen, and Adrianus Hendrawan. 2020. "Political Accountability and Public Service Delivery in Decentralized Indonesia: Incumbency Advantage and the Performance of Second Term Mayors." *European Journal of Political Economy* 64:101910. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101910>.

Martin, Nick, Sarah L. de Lange, and Wouter van der Brug. 2022. "Staying Connected: Explaining Parties' Enduring Connections to Civil Society." *West European Politics* 45(7):1385–1406. doi: 10.1080/01402382.2021.1986784.

Marwiyah, Siti, Sandi Ari Wicaksona, Vira Nur Wahyuni, and Yusril Nuris Tiantoro. 2022. "Utopia Konsep Kepemimpinan Pasca Reformasi: Embrio Despotisme Dan Dinasti Politik." *Jurnal Sosial Politik Integratif* 2(5):263–72.

Matthew B. Miles; A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI-Press.

Mukaromah, Khanifatul. 2022. "Faktor Keterpilihan Ipuk Fiestiandani Dalam Pilkada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020: Kontekstualitas Patronase Politik Dan Transformasi Sosial."

Perangin-Angin, M. Ichsan Bayunta, and Riaty Raffiudin. 2023. "Pengaruh Informasi Kinerja Incumbent Terhadap Partisipasi Pemilih Milenial Dalam Pilkada Medan 2020." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 9(2).

Sobari, Wawan. 2022. "Logika Peralihan Suara Dalam Pilkada: Analisis Sobari, Wawan. 2023a. "Non-Religious and Ethnic Orientations In The Voting Process: A Recent Study Of Javanese." 19(2):131–61. doi: <https://doi.org/10.21315/ijaps2023.19.2.6>.

Sobari, Wawan. 2023b. *Template Penulisan Metode Penelitian*. Vol. 2. 1st ed. edited by Zuhro, Siti. 2021. "Demokrasi Dan Kepemimpinan Transformatif." *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5(2):359. doi: 10.47313/jkik.v5i2.1463.